



LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI
BIDANG PERDAGANGAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN PENGAWASAN
PERSAINGAN USAHA, DAN BUMN

Rapat ke	: 33 (tiga puluh tiga)
Tahun Sidang	: 2025-2026
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI
Rapat Dengan	: Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
Hari, Tanggal	: Rabu, 1 Oktober 2025
Pukul	: 10.00 WIB
Sifat Rapat	: Terbuka
Pimpinan Rapat	: Andre Rosiade (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Anggrek Kurnianti, S.H., M.H., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	: Pengembangan Kawasan Batam
Hadir	: 1. 13 orang dari 24 Anggota Komisi VI DPR RI. 2. a. Kepala BP Batam, Sdr. Amsakar Achmad. b. Wakil Kepala BP Batam, Sdri. Li Claudia Chandra. beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) dan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, maka Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI pada pukul 11.22 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI pada hari Rabu, 1 Oktober 2025, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Bapak Andre Rosiade Wakil Ketua Komisi VI DPR RI.

II. KESIMPULAN

1. Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Kepala BP Batam terkait Pengembangan Kawasan Batam berikut penyelesaian masalah lahan nonproduktif di wilayahnya.
2. Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI mendukung BP Batam dalam rangka menjawab tantangan pengelolaan lahan dengan segera melakukan transformasi pelayanan lahan dan pemutakhiran legalitas lahan di Batam.
3. Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI mendukung penuh implementasi sistem Land Management System (LMS) BP Batam dalam waktu dekat sebagai bentuk transformasi pelayanan lahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis sistem, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta menyeluruh atas efektivitas implementasi LMS, termasuk fitur ketersediaan lahan, proses verifikasi, serta penerbitan dokumen agar tujuan penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan percepatan investasi dapat tercapai.
4. Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI mendorong BP Batam untuk segera menyelesaikan persoalan kepemilikan lahan non produktif dan melakukan penyelarasan terhadap berbagai regulasi yang dinilai menjadi hambatan bagi percepatan pertumbuhan investasi.
5. Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI mendorong BP Batam untuk mengoptimalkan sektor strategis seperti Kawasan Industri, galangan kapal, logistik hub untuk menopang pertumbuhan ekonomi nasional sehingga menjadikan Batam menarik sebagai destinasi investasi.
6. Panja Tata Kelola Kawasan Batam Komisi VI DPR RI meminta BP Batam untuk menyampaikan jawaban tertulis secara lengkap dan komprehensif dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja atas seluruh pertanyaan, pandangan, dan masukan yang telah disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI selama Rapat Dengar Pendapat ini.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.03 WIB.

KEPALA BP BATAM,

TTD.

AMSAKAR ACHMAD

**PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,**

TTD.

**ANDRE ROSIADE
A-74**